

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU**



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Dinas,



YULI TRIANA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I / IV b

Nip. 19750721 200112 2 001



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dihasilkan ditahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat, dengan 4 (empat) indikator program, yaitu persentase pertumbuhan sektor industri, persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, persentase koperasi aktif, persentase peningkatan usaha mikro dan kecil. Realisasi untuk empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persentase pertumbuhan industri terealisasi sebesar 9,96%
- b. Persentase pengembangan sarana distribusi perdagangan terealisasi 88,89%
- c. Persentase koperasi aktif, terealisasi sebesar 72,26%
- d. Persentase peningkatan usaha mikro dan kecil, terealisasi sebesar 17,27%

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjIP ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang.



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
c. Aspek Strategis Organisasi.....	2
d. Struktur Organisasi.....	3
e. Sumber Daya Manusia.....	3
f. Permasalahn Utama yang dihadapi Organisasi.....	5
g. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (2021-2026).....	7
1. Tujuan dan Sasaran.....	9
2. Indikator Kinerja.....	11
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
4. Program.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan	12
C. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Kinerja.....	19
1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini.....	20
2. Membandingkan antara Realisasi Kerja serta capaian kinerja ini dengan tahun lalu dan berapa tahun terakhir.....	21
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Renstra.....	21
4. Membandingkan Realisasi Kerja tahunan ini dengan Standar Nasional.....	...
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau eningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	27
6. Analisis Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian/Pernyataan Kinerja.....	28
C. REALISASI ANGGARAN.....	56
BAB IV. PENUTUP.....	60



Bab I

Pendahuluan

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) dari Pemerintah Kabupaten Malinau. Awal pembentukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah dengan nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 131 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pada tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 17 tahun 2008 dan ada penambahan nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan terakhir adalah dengan adanya Perda No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Malinau yang diperkuat dengan Perbup No. 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perindagkop dan UMKM berubah nomenklturnya menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.

b. Kedudukan Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah tanggal 28 Desember 2016 Adapun Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sesuai dengan skala prioritas, target pencapaian dan kebutuhan masyarakat sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang secara maksimal sesuai dengan target capaian yang ditetapkan.
3. Mengadakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian baik ditingkat internal maupun eksternal dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan UMKM.
4. Melaksanakan tata kelola usaha dinas secara profesional guna mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan

c. Aspek Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau berdasarkan Keputusan Bupati Malinau nomor 43 tahun 2016 menetapkan struktur organisasi sebagai berikut :

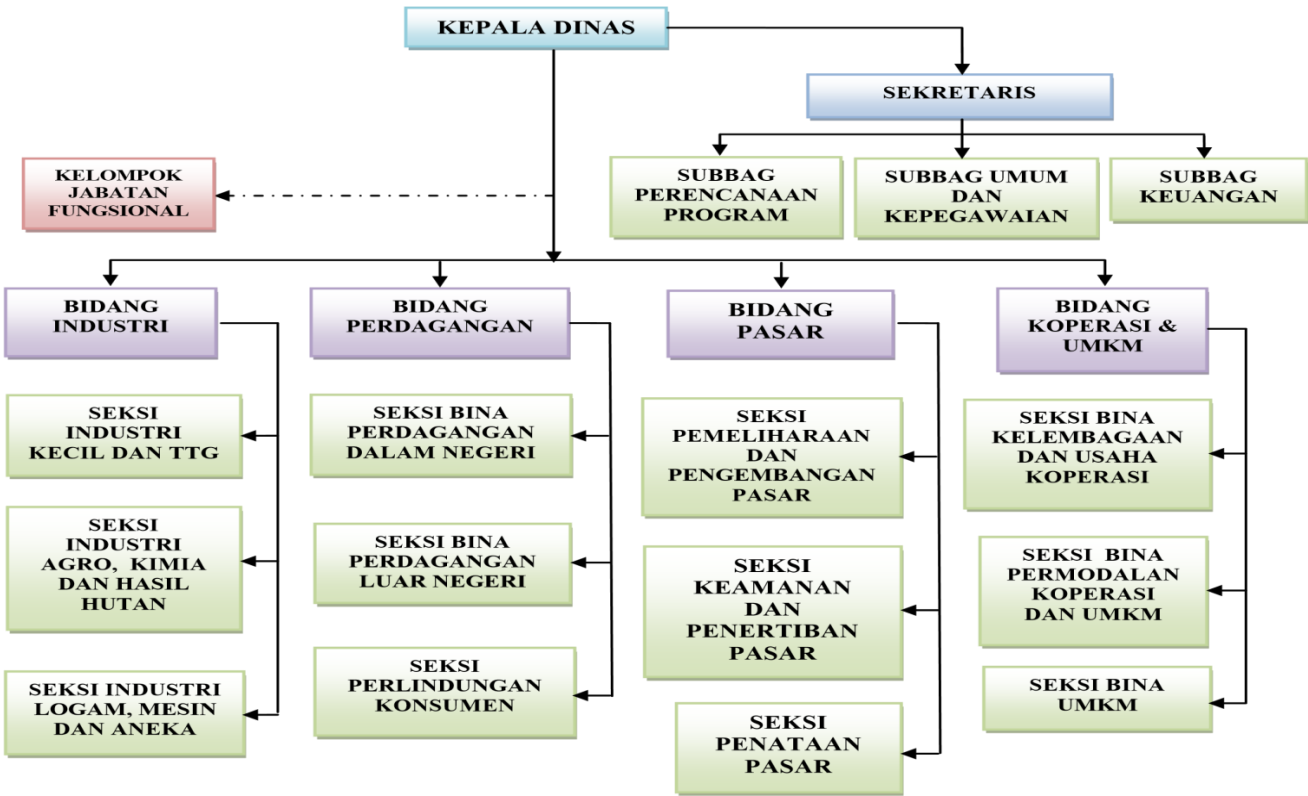


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - i. Kasubag Penyusunan Program
 - ii. Kasubag Keuangan
 - iii. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Industri
 - i. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Industri (ILMEA)
 - ii. Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - iii. Kepala Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
4. Kepala Bidang Perdagangan
 - i. Kepala Seksi Bina Perdagangan Dalam Negeri
 - ii. Kepala Seksi Bina Perdagangan Luar Negeri
 - iii. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
5. Kepala Bidang Koperasi dan UKM
 - i. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil
 - ii. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha koperasi
 - iii. Kepala Seksi Bina Permodalan dan UMKM
6. Kepala Bidang Pasar
 - i. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan pasar
 - ii. Kepala Seksi Keamanan dan Penertiban Pasar
 - iii. Kepala Seksi Penataan Pasar
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Fungsional

d. Struktur Organisasi

(Berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2016) struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAG



e. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Malinau didukung oleh Sumberdaya Manusia

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Disperindag berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per Desember 2023

Jenis Kelamin	Pendidikan					Jumlah
	SMA	D.III	D.IV	S.1	S.2	
Pria	6	2	-	7	5	20
Wanita	-	3	-	10	4	15
Jumlah	6	5	-	17	9	37

Sumber Data Kepegawaian Disperindag Kab. Malinau



1. Berdasarkan Eselon Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menempati jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV/Jafung sebanyak 15 orang, dan Non Eselon sebanyak 17 orang.

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Disperindag berdasarkan Eselon Per Desember 2023

Jenis Kelamin	Eselon					
	I	II	III	IV/Jafung	Non Eselon	Jumlah
Pria	-	1	4	9	10	24
Wanita	-	-	1	5	7	13
Jumlah	-	1	5	14	17	37

Sumber Data Kepegawaian Disperindag Kab. Malinau

2. Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 37 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menempati Golongan II sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 22 orang, Golongan IV/Jafung sebanyak 9 orang.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Disperindag berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2023

Gender	Eselon					
	I	II	III	IV/ Jafung	Non Eselon	Jumlah
Pria	-	-	2	9	10	24
Wanita	-	1	3	5	7	13
Jumlah	-	1	5	14	17	37

Sumber Data Kepegawaian Disperindag Kab. Malinau



Tabel 1.4
Daftar Nama Jabatan Pejabat Struktural / Jabatan
Fungsional, Kelas Jabatan dan Ketersediaan Pegawai
Per Desember 2023

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai
1	Kepala Dinas	II B	1	1
2	Sekretaris	III A	1	1
3	Kepala Bidang Industri dan TIG	III B	1	1
4	Kepala Bidang Perdagangan	III B	1	1
5	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	III B	1	1
6	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	III B	1	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV A	1	1
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV A	1	1
9	Analisis Perencana Ahli Muda	Non Eselon	1	1
10	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Non Eselon	1	1
11	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Non Eselon	1	1
12	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Non Eselon	1	1
13	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	Non Eselon	1	1
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	Non Eselon	1	1
15	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	Non Eselon	1	1
16	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Non Eselon	1	1
17	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Non Eselon	1	1
18	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Non Eselon	1	1

f. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya pada sektor perekonomian, berbagai macam tantangan yang dihadapi semakin beragam dan berat seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman.

Permasalahan Utama

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Industri Lokal
2. Terbatasnya SDM pelaku usaha IKM
3. Belum maksimalnya Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Rendahnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
7. Rendahnya Kapasitas SDM UMKM dan tidak menguasai IT

g. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media informasi yang menggambarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi perangkat daerah pada tahun yang telah lewat. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :



1. BAB I PENDAHULUAN :

- a. Dasar Pembentukan Organisasi
- b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Aspek Strategis Organisasi
- d. Struktur Organisasi
- e. Sumber Daya Manusia
- f. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
- g. Sistematika Penyajian

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA :

- A. Rencana Strategis (2021-2026)
 1. Tujuan dan Sasaran
 2. Indikator Kinerja
 3. Strategi dan Arah Kebijakan
 4. Program
- B. Rencana Kinerja Tahunan dan
- C. Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini
 2. Membandingkan antara Realisasi Kerja serta capaian kinerja ini dengan tahun lalu dan berapa tahun terakhir
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Renstra
 4. Membandingkan Realisasi Kerja tahunan ini dengan Standar Nasional
 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian/Pernyataan Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

4. BAB IV PENUTUP :

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang.



Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan berakhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026. Berbeda dengan Renstra tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tidak lagi merumuskan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. OPD terkait melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 adalah :



“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Dukung Pemerintahan yang Profesional”

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Kabupaten Malinau yang Mandiri** adalah

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/ berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

- **Kabupaten Malinau yang Damai** adalah

Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan supremasi hukum.

- **Kabupaten Malinau yang Sejahtera** adalah

Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

- **Pemerintahan yang Profesional** adalah

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya sistem pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*), efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.



Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun asas kesetaraan dalam pelayanan publik yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 untuk mencapai visi tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yakni **Misi ke-2 yaitu : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal melalui indikator Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB.** Adapun sasaran dalam pelaksanaan misi ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau mendukung sasaran Adapun sasaran pada RPJMD adalah :

1. Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah. Dengan indikatornya :
 - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dengan target 2,70%
2. Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan indikatornya :
 - Persentase koperasi berkualitas, dengan target 70 %.
 - Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan target 70,60 %.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah (2021-2026)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau merupakan instansi teknis yang bertugas membantu Bupati melaksanakan visi dan misinya dalam kurun waktu 2021 - 2026 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Titik berat pembangunan bidang ekonomi urusan wajib Koperasi dan UMKM dan urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 adalah **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal melalui indikator Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB.**



Dengan sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB, serta meningkatnya jumlah koperasi berkualitas dan meningkatnya usaha mikro dan kecil.

1. Adapun Tujuan dan Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun indikator prioritas sebagai berikut :

Meningkatkan potensi usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah Indikator yang ingin dicapai :

- 1. Persentase Pertumbuhan Industri
- 2. Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3. Persentase Koperasi Aktif
- 4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Tujuan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dicapai melalui 9 (Sembilan) program yang akan dilaksanakan masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun 9 (sembilan) program prioritas dimaksud yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ SasaranStrategis	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan potensi usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasidan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase peningkatanusaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM	39,10%	46,40%	50,08%	54,40%	60,83%	71,25%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Revitalisasi Pasar	25%	30%	45%	60%	80%	100%
		Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	66%	70%	72%	74%	765%	80%
		Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	55,40%	70,60%	73,30%	76,60%	83,30%	100%



2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 2.2
Tabel Indikator Kinerja 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBERDATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan potensi usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Tahun } (n-1)**}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Industri	Kabid Industri & TTG
		Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Revitalisasi Pasar	$\frac{\text{Jumlah Pasar dalam kondisi baik} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Pasar}}$	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
		Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$	Bidang Koperasi & UMKM	Kabid Koperasi & UMKM
		Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Kecil dan Mikro (UKM)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh UKM}}$	Bidang Koperasi & UMKM	Kabid Koperasi & UMKM

Sumber Data : RENSTRA 2021-2026 Disperindag

3. Program

Program dan kegiatan pada tahun 2023 mengacu pada aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri yakni SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Ada perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- **Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- **Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**



Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- **Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Penataan Organisasi

- **Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- **Program : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- **Program : Pengembangan Ekspor**

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

4. Program : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

5. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan



Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malinau

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	5%
2.	Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Revitalisasi Pasar	50%
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	72 %
4.	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	73,30%

Sumber Data : RENSTRA 2021-2026 Disperindag

Tabel 2.4
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Serta Kompetensi SDM Koperasi	75 Orang	388.969.000
2.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	- Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Usaha	418.500.000 840.680.300
3.	Pengembangan UMKM	- Pengembangan UMKM - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	200 UMKM	2.775.150.000
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah' - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Orang 1 Paket 4 Laporan	5.460.691.776 99.998.000 150.664.000
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2.547.103.426



6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat -Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam Satu (1) Kabupaten/Kota - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	24 Laporan	299.981.550
			24 Laporan	149.999.200
			4 Laporan	400.000.000
			1 Laporan	49.939.000
7.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi dan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Negeri	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100%	79.301.500
8.	Standarisasi Perlindungan Konsumen	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	200 Unit	149.937.000
			100 Orang	49.840.000
9.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumentasi	179.803.000
			3 Unit	1.325.282.845
			Dokumentasi	1.624.999.582

Sumber Data : Renja Disperindag 2023

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



**Tabel 2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	5%
2.	Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Revitalisasi Pasar	50%
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	72 %
4.	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Kecil dan Mikro (UKM)	73,30 %

Sumber Data : PK Kadis 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 388.969.000,-	APBD-P
2.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.259.180.300,-	APBD-P
3.	Pengembangan UMKM	Rp. 2.775.150.000,-	APBD (DBH DR)
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.547.103.426,-	APBD-P
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 849.980.750,-	APBD-P
6.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 199.777.000,-	APBD
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 79.301.500,00	APBD-P
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 3.130.085.427,-	APBD-P

Pada Perjanjian kinerja tersebut terjadi kesepakatan antara penerima amanah (Kepala Instansi/OPD) dan pemberi amanah (Kepala Daerah). Kesepakatan keduanya dalam perjanjian kinerja tersebut didasarkan atas kinerja tertentu yang terukur sesuai dengan indikatornya dan target yang ditetapkan.

Penetapan ini sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada OPD yang bersangkutan.

Adapun tujuan penyusunan dan penetapan pada perjanjian kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah serta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai Permen PAN RB No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah, maka perjanjian kinerja Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



BAB III
Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase
Tingkat Capaian

=

Realisasi

Target

X

100%

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

Persentase Tingkat
Capaian

=

Target - (Realisasi
- Target)

Target

X

100%

A. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian visi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai pembenaran yang logis atas



pencapaian visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

1. Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. Keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 adalah baik, dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 17.125.541.379,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi Rp. 14.938.649.490,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sekitar 87,84%



Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan penilaian kinerja, dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur, dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	5	9,96	199
2.	Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Revitalisasi Pasar	50	88,89	177,78
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	72	72,26	100,36
4.	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	73,30	17,27	23,57

Sumber Data: Disperindag Tahun 2023

Capaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun sebesar 125,17%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada public maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Disperindag.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 4 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.



Tujuan :

Meningkatkan potensi usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*) melalui 4 Sasaran dengan 4 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Dokumen	5	9,96	199

Sumber Data : Bidang Industri Disperindag 2023

Sasaran Pertama : Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat dari Target VS Realisasi, target pertumbuhan industry tahun 2023 sebesar 5% sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 9,96% dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 199%, pertumbuhan industri tahun 2023 melampaui target yang ditentukan.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Industri	Dokumen	9,96	22,61	17,22	76,16	344

Sumber : Bidang Industri Disperindag 2023



Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Pertumbuhan Industri tahun 2023 sebesar 9,96% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 17,22% sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 22,61% atau realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 344% dan realisasi tahun 2021 sebesar 76,16%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 145% terhadap capaian tahun 2022, dan perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 267,84%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.2.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target REN\$TRA

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RenstraTahun 2026
1	2	3	4	5
Pertumbuhan Industri	Dokumen	9,96	5	199

Sumber : Bidang Industri Disperindag

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Pertumbuhan Industri tahun 2023 sebesar 9,96% dengan target akhir RESNTRA tahun 2026 sebesar 199% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian Pertumbuhan Industri sebesar 199% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

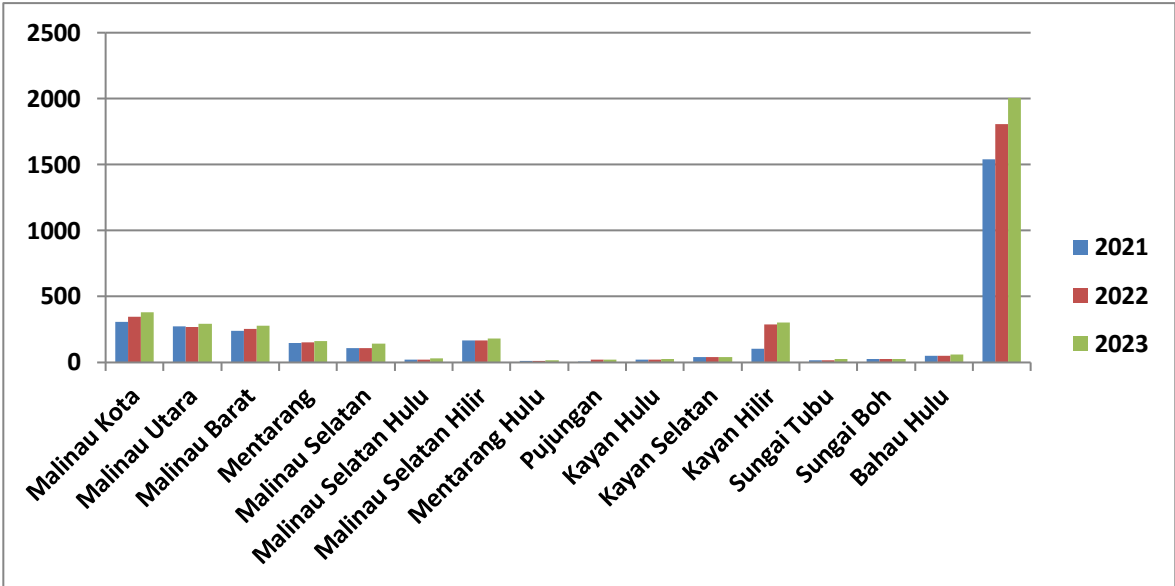
Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

Industri adalah bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung atau tidak langsung kemudian diolah untuk menghasilkan barang-barang yang lebih bernilai bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam suatu industri disebut industri.

Jika melihat dari definisinya secara umum industri bisa diartikan sangat luas dan mencakup semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial. Karena merupakan industri yang luas, jumlah dan jenis industri bervariasi dari satu negara ke negara atau wilayah lainnya.



Data Perkembangan Industri dapat dilihat pada tabel berikut :



Grafik 1

Apabila dilihat lebih jauh, pertumbuhan industri Kabupaten Malinau di Tahun 2023 ini terjadi pada industri kecil maupun industri menengah, sementara industri besar cenderung tetap. Hal ini mengingat bahwa kebijakan tata ruang Kabupaten Malinau yang terbatas untuk adanya penambahan jumlah industri besar.

Sedangkan untuk jenis dan kelompok usahanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Jenis dan Kelompok Usaha Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	Jenis Industri	Aneka Usaha
1.	Pangan/Agro	1. Pembuatan Roti & Kue 2. Penggilingan Daging 3. Penggilingan Padi 4. Depo Air Minum 5. Tahu & Tempe 6. Pembuatan Mie 7. Kopi Bubuk 8. Obat Tradisional 9. Minyak Sawit
2.	Logam	1. Bengkel 2. Las, Teralis dan Bubut 3. Pandai Besi 4. Penggilingan Aspal 5. Pembuatan Perahu 6. Pengolahan Aluminium 7. Servis Elektronik 8. Percetakan
3.	Bahan Bangunan	1. Bata / Batako / Paving 2. Moulding
4.	Kerajinan	1. Anyaman 2. Manik-manik 3. Ukiran
5.	Furniture	1.Meubelair
6.	Konveksi	1.Penjahitan

Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2023



Rekapitulasi Pertumbuhan Industri perkecamatan se-Kab. Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Grafik 2

Rumus yang dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan industri adalah sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Industri\ Tahun\ n - Jumlah\ Industri\ Tahun\ (n-1)**}{Jumlah\ Industri\ s/d\ Tahun\ n} \times 100\%$$

$$\frac{(2008-1808)}{2008} \times 100\% = 9,96\%$$

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan /Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI	Peningkatan	1. Meningkatnya usaha baru Industri 2. Meningkatnya SDM pelaku industry 3. Meningkatnya mutu pelaku industry 4. Pengembangan teknologi pelaku industri	1. Pembinaan dan menumbuhkan usaha baru dan pengawasan terhadap klaster baru yang ada 2. Pelatihan SDM baik Kriya dan Aneka Kuliner 3. Fasilitasi bantuan mesin peralatan industry 4. Fasilitasi berkenaan HaKI, Paten Sertifikat Halal, SNI Produk dan Pelatihan Keamanan Pangan

Sumber Data : Bidang Industri Disperindag 2022

Adapun makna Indikator adalah Industri Pengolahan yang tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu tertentu dan menghasilkan nilai tambah terhadap PDRB yang cukup berarti untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.



Hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan menumbuhkembangkan industri melalui berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan dan bimbingan teknis industri. Sehingga usaha IKM semakin berkembang dan mendaftarkan legalitas usahanya menjadi Industri Kecil formal. Perkembangan usaha industri setiap tahunnya dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan Industri Pengolahan dapat pada tahun 2023 sebanyak 200 pelaku usaha.

Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2023 persentase pertumbuhan industri sebesar 9,96% atau 199% dari target masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dapat tercapai.

Perkembangan usaha industri pada tahun 2023 sebanyak 200 pelaku usaha. Untuk indikator Persentase Industri dapat terealisasi sebesar 9,96%

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi

Faktor Pendukung Capaian Kinerja :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkannya jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.
5. Kerjasama Tim yang baik

Upaya mempertahankan kinerja Persentase Pertumbuhan Industri adalah :

1. Terus meningkatkan sarana / prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri .
2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kreatif.
3. Memotivasi pelaku industri kreatif dalam pemanfaatan bahan baku yang cukup.
4. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kuliner.
5. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri
6. Meningkatkan pemasaran produk unggulan tingkat lokal, nasional maupun internasional

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian persentase peningkatan jumlah pertumbuhan industri adalah :

1. pembinaan dan menumbuhkan usaha baru dan pengawasan terhadap usaha baru yang ada



- 2. pelatihan SDM baik Kriya dan Aneka Kuliner
- 3. Fasilitasi bantuan mesin peralatan industri
- 4. Fasilitasi berkenaan HaKI, Paten Sertifikasi Halal, SNI Produk dan Pelatihan Keamanan Pangan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Disperindag dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malinau dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sasaran Pertama dengan indikator kinerja sasaran pertumbuhan industri di targetkan sebesar 5% dapat terealisasi 9,96% atau capaian kinerjanya mencapai 199% telah melampaui target kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini industri pengolahan merupakan kontribusi terbesar dalam pembentukan struktur perekonomian. Hal ini sejalan pula bertambahnya jumlah industri di Malinau.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase Efisiensi Biaya

= 100% -

Realisasi Anggaran

Target Anggaran

X100%

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahun 2023 Pertumbuhan Industri sudah melampaui target yang direncanakan.



Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Pertumbuhan Industri sebesar Rp. 3.130.085.427,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.647.357.902,- atau capaian realisasi sebesar 85% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 199%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.482.27.525,-

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia :

1. SDM OPD Disperindag dilaksanakan mengikuti FGD SliNAS dan FGD Sertifikasi Halal

Dalam melaksanakan tugas bidang industri di dukung oleh 8 personil terdiri dari : 1 orang kapid, 3 orang jabatan fungsional, 3 orang staf ASN, 1 orang staf Non ASN

2. SDM Pelaku Usaha /IKM yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan industry :

- Bimtek membatik
- Bimtek Tenun
- Bimtek Menjahit (anyam tas)
- Bimtek Menjahit (buat pola)

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Analisis Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja OPD tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	199
Rata-Rata Capaian Kinerja			199

Dari tabel 3.8 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keungan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Industri dengan realisasi keuangan 85%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Penjelasan Keberhasilan/Kegagalan : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

- Realisasi Indikator Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (100%) melebihi target (100%), Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (199%). Indikator Kinerja **"Sangat Berhasil"**
 - ✓ Realisasi Indikator Kegiatan (9,96%) melebihi target (5%)
- 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100 IKM) sama dengan target (100%). Analisis Capain Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja "Sangat Berhasil"
- 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Realisasi Indikator Sub Kegiatan (3 tiga) unit sama dengan target (3 unit). Analisa Capaian Indikator sebesar (100%). Indikator Kinerja "Sangat Berhasil"
- 4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Realisasi Indikator Sub Kegiatan (150 IKM) unit sama dengan target (150 IKM). Analisa Capaian Indikator sebesar (100%). Indikator Kinerja "Sangat Berhasil"

DOKUMENTASI KEGIATAN INDUSTRI TAHUN 2023 :



Gambar 1 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri



Gambar 2 : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	199	Perencanaan dan Pembangunan Industri	85

Sumber :Bidang Industri Disperindag 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Pertumbuhan Industri dengan realisasi keuangan 85% Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Perumbuhan Industri adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian
Sasaran 2
Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	%	50	88,89	177,78

Sumber Data : Bidang Perdagangan Disperindag 2023

Sasaran Kedua : Meningkatkan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat target vs realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023, target pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2023 sebesar 50% sedangkan realisasi sebesar 88,89 dengan capaian kinerja sebesar 177,78%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	%	88,89	-	42,75	-	106,87

Sumber : Bidang Perdagangan Disperindag 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2023 sebesar 88,89% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 42,75% atau realisasi capaian kinerja sebesar 106,87% dan realisasi tahun 2021 sebesar 0% atau realisasi capaian kinerja sebesar 0% Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 70,91% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan
Tahun 2023 Dengan Target REN\$TRA

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RenstraTahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	88,89	50	177,78

Sumber : Bidang Industri Disperindag

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan tahun 2022 sebesar 42,75% dengan target akhir RESNTRA tahun 2026 sebesar 106,87, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan sebesar 88,89% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jas untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara lansung atau tidak langsung kepada konsumen.
- Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau



DATA SARANA PASAR KABUPATEN MALINAU

TAHUN 2021 - 2023

NO	NAMA PASAR	ALAMAT LOKASI PASAR	KEPEMILIKAN	SUMBER	LUAS (M²)		FASILITAS PASAR		JUMLAH	PASAR			KETERANGAN	
		DESA & KECAMATAN		DANA	LAHAN	BANGUNAN	KIOS	LOS MEJA	KIOS + MEJA	BAIK	SEDANG	RUSAK	KOMODITI	JML PEDAGANG
1	Pasar Induk Kab. Malinau	Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota	Pemda	APBD	3,000	2500	167	246	413	✓	-	-	Sembako, sayur, ikan & Daging	378 org
2	Pasar Besar	Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota	Pemda	DAK	2,700	2000	12	28	40	✓	-	-	Buah bukaan	40 org
3	Pasar Bhineka	Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat	Pemda	APBD	2,800	2000	4	6	10	✓	-	-	Sembako, sayur, ikan & Daging	10 org
4	Pasar Gerdema	Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat	Pemda	DAK	1,400	1761	10	40	50	✓	-	-	Sembako, sayur, ikan & Daging	50 org
5	Pasar Isai	Desa Kuala Lapang Kec.Malinau Barat	Pemda	DAK	3,000	360	0	60	60	✓	-	-	Sayer, ikan	150 org
6	Pasar Besar Bako	Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang	Pemda	APBD I Prov	250	200	0	30	30	✓	-	-	Sayer, ikan	30 org
7	Pasar Rakyat Malinau Selatan	Desa Ioreh Baru Kec. Malinau Selatan	Pemda	APBN (DAK)	5,000	2600	6	14	20	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	20 org
8	Pasar UMKM	Desa Long Ampung Kec. Kayan Selatan	Pemda	APBN (DAK)	150	100	0	10	10	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	10 org
9	Pasar Pemung Tawai	Desa Mahak Baru Kec. Suagai Bok	Pemda	APBN (DAK)	150	100	0	10	10	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	10 org
10	Pasar Rakyat Tro Piah	Desa Respa Tubu Kec. Malinau Utara	Pemda	APBN (DAK)	2,500	216	0	34	34	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	34 org
11	Pasar Data Diaa	Desa Data Diaa Kecamatan Kayan Hilir	Pemda	TP	5,000	414	11	49	60	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	60 org
12	Pasar Ruitik Luei	Desa Langap Kec. Malinau Selatan	Pemda	APBN (DAK)	3,000	208	0	24	24	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	24 org
13	Pasar Urip Jan	Desa Metut Kec. Malinau Selatan Hulu	Pemda	APBN (DAK)	10,000	208	0	24	24	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	24 org
14	Pasa Belitang	Desa Sesua Kec. Malinau Barat	Pemda	APBN (DAK)	4,547	208	0	24	24	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	24 org
15	Pasar Kanaa	Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang	Pemda	TP	7,703	113	19	173	192	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	192 Org
16	Pasar Semeladung	Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara	Pemda	TP	1,000	250	4	17	21	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	21 org
17	Pasar Ferryung	Desa Long Berang	Pemda	APBN (DAK)	600	216	0	24	24	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	24 org
18	Pasar Imbaya	Desa Malinau Seberang	Pemda	APBN (DAK)	250	261	3	28	31	✓	-	-	Sayer, ikan dan Daging	31 org

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentiing

No.	Nama Kementerian/Lembaga ↑	PNB Pelaksanaan UMK (Rp)	Total Pembayaran (Rp)	Total Pembayaran PNB (Rp)	Total Pembayaran Impor (Rp)
211	KAB. MADIUN	339.928.828.653	0	0	0
212	KAB. MAGELANG	252.563.478.396	60.000	0	60.000
213	KAB. MAGETAN	287.163.380.810	526.964.214.655	437.454.768.499	89.509.426.156
214	KAB. MAHAKAM ULU	364.638.347.426	30.755.715.090	28.745.296.441	2.010.418.649
215	KAB. MAJALENGKA	414.354.921.128	54.075.639.739	54.012.175.739	63.464.000
216	KAB. MAJENE	123.740.997.770	0	0	0
217	KAB. MALAKA	165.726.606.771	0	0	0
218	KAB. MALANG	536.722.284.445	70.276.851.904	70.276.851.904	0
219	KAB. MALINAU	666.665.991.924	4.124.200	4.124.100	100
220	KAB. MALUKU BARAT DAYA	155.301.320.393	0	0	0

No.	Nama Kementerian/Lembaga ↑	Pelaksanaan E-Purchasing (%)	Capaian Komitmen E-Purchasing (%)	Total Pelaksanaan E-katalog (Rp)	Total Pelaksanaan UMK (Rp)
211	KAB. MADIUN	33.58 %	87.80 %	178.165.575.773	348.079.206.773
212	KAB. MAGELANG	48.12 %	83.55 %	224.020.442.393	265.036.643.345
213	KAB. MAGETAN	33.82 %	69.70 %	125.233.800.470	295.270.212.159
214	KAB. MAHAKAM ULU	10.77 %	68.44 %	70.515.201.877	369.410.339.111
215	KAB. MAJALENGKA	47.21 %	69.39 %	250.567.855.315	427.104.861.927
216	KAB. MAJENE	14.33 %	68.64 %	19.292.739.833	127.041.826.470
217	KAB. MALAKA	41.99 %	98.93 %	88.793.724.193	168.672.684.011
218	KAB. MALANG	63.89 %	87.25 %	460.960.461.760	558.163.719.407
219	KAB. MALINAU	49.04 %	84.18 %	397.417.276.055	679.696.925.942
220	KAB. MALUKU BARAT DAYA	19.98 %	61.64 %	37.115.613.284	160.283.977.521

No.	Nama Kementerian/Lembaga ↑	Pelaksanaan E-Purchasing (%)	Capaian Komitmen E-Purchasing (%)	Total Pelaksanaan E-katalog (Rp)	Total Pelaksanaan UMK (Rp)
211	KAB. MADIUN	33.58 %	87.80 %	178.165.575.773	348.079.206.773
212	KAB. MAGELANG	48.12 %	83.55 %	224.020.442.393	265.036.643.345
213	KAB. MAGETAN	33.82 %	69.70 %	125.233.800.470	295.270.212.159
214	KAB. MAHAKAM ULU	10.77 %	68.44 %	70.515.201.877	369.410.339.111
215	KAB. MAJALENGKA	47.21 %	69.39 %	250.567.855.315	427.104.861.927
216	KAB. MAJENE	14.33 %	68.64 %	19.292.739.833	127.041.826.470
217	KAB. MALAKA	41.99 %	98.93 %	88.793.724.193	168.672.684.011
218	KAB. MALANG	63.89 %	87.25 %	460.960.461.760	558.163.719.407
219	KAB. MALINAU	49.04 %	84.18 %	397.417.276.055	679.696.925.942
220	KAB. MALUKU BARAT DAYA	19.98 %	61.64 %	37.115.613.284	160.283.977.521

No.	Nama Kementerian/Lembaga ↑	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Total Perencanaan PNB (Rp)	Komitmen PNB Thd Perencanaan Belanja (%)	Perencanaan PNB Penyedia (%)	Total E-Purchasing perencanaan (Rp)
211	KAB. MADIUN	696.350.212.201	598.251.034.416	69.98 %	98.68 %	202.942.019.495
212	KAB. MAGELANG	777.172.689.014	776.336.648.787	62.00 %	99.89 %	268.170.595.975
213	KAB. MAGETAN	583.927.613.793	559.277.341.542	67.35 %	95.78 %	179.686.138.342
214	KAB. MAHAKAM ULU	939.746.228.609	937.518.896.609	80.30 %	99.76 %	103.096.200.841
215	KAB. MAJALENGKA	1.052.103.813.542	1.033.773.981.588	54.38 %	96.25 %	367.462.950.948
216	KAB. MAJENE	269.045.177.868	169.045.177.868	56.36 %	100 %	28.105.648.158
217	KAB. MALAKA	232.226.760.537	232.126.760.537	64.96 %	99.96 %	89.753.432.019
218	KAB. MALANG	984.867.419.358	899.414.546.522	46.92 %	91.32 %	571.229.148.005
219	KAB. MALINAU	949.500.251.969	853.841.827.302	57.90 %	90.11 %	472.103.049.936
220	KAB. MALUKU BARAT DAYA	294.165.466.243	293.688.786.743	49.89 %	99.16 %	80.211.058.261



Standarisasi Perlindungan Konsumen

DATA JENIS DAN JUMLAH ALAT UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023			
NO	JENIS UTTP	JUMLAH UTTP (buah)	BERTANDA TERASAH
1	ALAT UKUR PANJANG	0	0
2	TAKARAN	25	0
3	ANAK TIMBANGAN	10	0
4	TIMBANGAN SENTISIMAL	5	0
5	TIMBANGAN MEJA	0	0
6	TIMBANGAN PEGAS	1656	0
7	TIMBANGAN BOBOT INGSUT	5	0
8	TIMBANGAN KWADRAN	0	0
9	TIMBANGAN ELEKTRONIK	80	0
10	TIMBANGAN JEMBATAN	8	5
11	DACIN LOGAM	5	0
12	NERACA	0	0
13	METER ARUS KERJA	5	0
14	ASPHALT MIXING PLANT	2	0
15	SPBE/APMS	18	0
15	BEJANA UKUR	3	0
16	TANGKI UKUR MOBIL	5	0
17	POMPA UKUR	12	0
18	TUTSIT DAN TANGKI PENDAM	2	0
19	WADAH CURAH	0	0
JUMLAH		1,841	5

Untuk indikator Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dapat terealisasi sebesar 50 % dengan hitungan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pasar dalam kondisi baik} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Pasar}}$$

$$\frac{16}{18} \times 100\% = 88,89$$

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan	1 Arah kebijakan Pembangunan pasar yang ditujukan untuk memenuhi standar pasar 2. Pengelolaan Pasar yang diarahkan untuk memenuhi standar 3. Adanya Pedagang Musiman/Pedagang Kaki Lima	1. Melaksanakan manajemen pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk memenuhi standar 2. Terus melakukan revitalisasi pasar sesuai standar 3. Meningkatkan penataan pedagang kaki lima

Tabel diatas, dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2023 Jumlah pasar dalam kondisi baik. Untuk indikator Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dapat terealisasi sebesar 50 %



Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha (Pedagang) dalam menjaga kebersihan areal Pasar.
- Harga dasar dan harga pasar cenderung berbeda, sehingga perlunya dilakukan pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sehingga terciptanya stabilitas harga dan tingkat inflasi dapat dikendalikan
- Masih kurangnya Kesadaran pelaku usaha perdagangan terhadap kewajiban tera/tera ulang.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkannya jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.
5. Kerja sama Tim yang baik

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian target pengelolaan sarana distribusi perdagangan adalah :

1. Mengoptimalkan, Asosiasi dan pelaku usaha/pedagang untuk menjaga keamanan pasar
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
3. Terus melakukan revitalisasi pasar sesuai standar.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahun 2023 Pertumbuhan Industri sudah melampaui target yang direncanakan.



Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja

- Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp. 2.547.103.426,- anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.187.084.917,- atau capaian realisasi sebesar 85,87% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 360.018.509,-
- Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesarRp. 299.981.550,- anggaran yang disediakan sebesar Rp. 265.990.695,- atau capaian realisasi sebesar 88,67% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 33.990.855,-
- Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp. 549.999.200,- anggaran yang disediakan sebesar Rp. 528.557.839,- atau capaian realisasi sebesar 96,10% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 21.441.361,-
- Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49.939.000,- anggaran yang disediakan sebesar Rp. 32.830.000,- atau capaian realisasi sebesar 65,74% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 17.109.000,-
- Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diKabupaten Malinau sebesar Rp. 199.777.000,- anggaran yang disediakan sebesar Rp. 65.574.224,- atau capaian realisasi sebesar 32,82% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 134.202.776,-
- Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp. 79.301.500,- anggaran yang disediakan sebesar Rp. 71.630.078,- atau capaian realisasi sebesar 90,33% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 7.671.422,-



Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia :

1. SDM OPD Disperindag (Bidang Penataan Pasar) dilaksanakan mengikuti :

- Aplikasi SAKTI untuk pengelolaan keuangan dana pusat
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah
- Sudi Banding untuk meningkatkan pengelolaan pasar

Dalam melaksanakan tugas bidang penataan pasar di dukung oleh 8 personil terdiri dari : 1 orang kabid, 3 orang jabatan fungsional, 3 orang staf ASN, 1 orang staf Non ASN

2. SDM OPD Disperindag (Bidang Perdagangan) dilaksanakan mengikuti : Pemantauan Harga Barang Pokok sama Penginputan ke Aplikasi

Dalam melaksanakan tugas bidang perdagangan di dukung oleh 8 personil terdiri dari : 1 orang kabid, 3 orang jabatan fungsional, 3 orang staf ASN, 1 orang staf Non ASN

dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malinau dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut

Sasaran Kedua dengan indikator kinerja sasaran Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan di targetkan sebesar 50 % dapat terealisasi 88,89% atau capaian kinerjanya mencapai 177,78% telah melampaui target kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan semakin bagus merupakan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan struktur perekonomian.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.5
Analisis Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja OPD tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	177,78
Rata-Rata Capaian Kinerja			177,78

Penjelasan Keberhasilan/Kegagalan :Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

Realisasi Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi indikator program (4 pasar) dengan target (4 pasar). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (177,78%). Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Kegiatan (4pasar/18pasar = 22,2%) sama dengan target (22,2 persen), Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%), Indikator Kinerja “Berhasil”
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, (4 pasar) sama dengan target (4 pasar), Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%), Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, realisasi indikator program (12bulan) dengan target (12bulan), Analisa Capaian Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Kegiatan (24 laporan) sama dengan target (24 laporan),Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%),Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Realisasi Indikator Kegiatan (2 kali) dengan target (2 kali), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Realisasi Indikator Kegiatan (24 kali) dengan target (24 kali), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Realisasi Indikator Kegiatan (4pasar) dengan target (4pasar), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Realisasi Indikator Kegiatan (4 pasar) dengan target (4 pasar), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota, Realisasi Indikator Kegiatan (1 laporan) dengan target (1 laporan), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, Realisasi Indikator Sub Kegiatan (4 pasar) dengan target (4 pasar), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”



Realisasi Indikator Program Standarisasi Perlindungan Konsumen, realisasi indikator program (12bulan) dengan target (12bulan), Analisa Capaian Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, Realisasi Indikator Kegiatan (**1 laporan**) dengan target (**1 laporan**), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Sub **Kegiatan** Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Realisasi Indikator Sub Kegiatan (200 unit) dengan target (200 unit), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Sub **Kegiatan** Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100 orang) dengan target (100 orang), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, realisasi indikator program (12bulan) dengan target (12bulan), Analisa Capaian Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja “Berhasil”

Realisasi Indikator Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Realisasi Indikator Kegiatan (**100%**) dengan target (**100%**), Analisa Capaian Kinerja Sebesar (100%) Indikator Kinerja “Berhasil”

DOKUMENTASI KEGIATAN PERDAGANGAN TAHUN 2023





Gambar 3 : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Gambar 4 : Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat



Gambar 5 : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota



Gambar 6 : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota



Gambar 7 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi



Gambar 8 : Metrologi Legal



Gambar 9 : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian
Sasaran 3 Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koperasi Aktif	Orang	72	72,26	100,36

Sumber Data : Bidang Koperasi & UMKM
Disperindag 2023



Sasaran Ketiga : Meningkatnya Koperasi Aktif

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat target vs realisasi kinerja tahun 2023 target koperasi aktif 72% sedangkan realisasi 72,26% dengan capaian kinerja sebesar 100,36%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Koperasi Aktif	Orang	72,26	48	48,84	101,75	69,77

Sumber : Bidang Koperasi dan UMKM Disperindag

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Koperasi Aktif tahun 2023 sebesar 72,26% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 48,84%, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 48% atau realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,36% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 69,77% realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 72,27%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Koperasi Aktif	Orang	72,26	72	100,36

Sumber : Bidang Industri Disperindag

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Koperasi Aktif tahun 2023 sebesar 72,26% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 100,36% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian Koperasi Aktif sebesar 48,84% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara hukum, koperasi diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012. Pada pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

Koperasi tidak dapat dilepaskan dari UMKM, bahkan nantinya pelaku UMKM diarahkan menjadi anggota koperasi. Sebaliknya, anggota koperasi yang aktif saat ini didorong untuk menjadi pelaku UMKM, terutama yang bergerak dalam lini sektor ekonomi unggulan seperti pangan, komoditas, maritim, pariwisata, dan industri pengolahan

KOPERASI AKTIF KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

No	Nama Koperasi
1	KSU. Maya Taka
2	KSU. Pagun Taka
3	KSU. Sejahtera
4	KSU. Pakuaja
5	KPN. Wana Jaya
6	Kopkut Darat. Rukun Lestari
7	Kopwan. Karya Wanita
8	Kopsek. Handayani SMPN 1
9	Kopdit. CU. Femung Pebaya
10	KPN. Mafit Jaya
11	Koperasi Simpan Pinjam TAAN TOU
12	KSU Udip Mading
13	KSU Tirta Intimung
14	Koptan.Pandan Lestari
15	Kop. Pasar Buah GERDEMA
16	Koptan. Teguh Karya
17	Kop. Jasa SMAN 1 Malinau
18	KSU Distakot Malinau
19	Koperasi Seludan Jaya
20	Kop. Putra Buluk
21	KSU. Mitra Karya Jaya
22	KSU. Godam Pebaya Sejahtera
23	KSP. Putra Mandiri Borneo
24	Kop. Jasa Avia Bandara Malinau
25	Koperasi Jasa Malinau Maju Sejahtera
26	Koperasi Jasa Pramuka Jaya Malinau
27	Koperasi Pemasaran Sawit Intimung
28	Koperasi Pemasaran Produk Lokal Kab. Malinau
29	Koperasi Jasa Borneo Indah Lestari
30	Koperasi Pasar Baru Tj. Lapang
31	KSU. Pebaya Mulun
32	KSU. Ferurung
33	KSU. Andika Jaya Putra



34	KSU. Fajar Diniar
35	KSU. Keluarga Jaya Amdal Mandiri
36	KSU.Camar Bahagia
37	Kop.TKBM Mekar Baru
38	Koptan. Feruyung
39	Koperasi Konsumen Madani Utama Sejahtera
40	Koperasi JASA FERURUM NAKAP ULUN
41	Koperasi Jasa Primer Kartika Raja Pandhita
42	Koptan. Gema Borneo Mandiri
43	KSU. Sejahtera Bersama
44	KSU. Sawit Mandiri
45	Kopbun. Rimbunan Hijau
46	Kop.Bun.Kuala Lapang Maju Sejahtera
47	Kop.Bun.Pelangi Sawit Sejahtera
48	Kop.Jasa Karya Bersama Unit.Sempayang
49	Kop. Bun Bengalun Sejahtera
50	Kop. Jasa Maju Bersama
51	KSU SMKN 1 Malinau
52	Koperasi Malinau Sawit Abadi
53	KSU. Busak Baku
54	Koperasi Jasa Sawit Maju Sejahtera Bersama
55	Kopkar PT. Inhutani Kaltara
56	KSU. Gerbang Dema
57	Koptan Sri Agung
58	Koptan. Paking Maju
59	Koptanbun. Keluarga Usaha Baru
60	Kop. Wanita Tani Wanima
61	KSU. Metui
62	KSU. Laue Terig Lestari
63	KSU. Saban Hari
64	Kop.Bun.Cahaya Rian
65	KSU.Lampun Sakti
66	KSU. Usaha Bersama
67	KSU.Bina Mandiri
68	Kop. Produsen. Benuang Bara Loreh Masela
69	Kop.Jasa Bina Usaha
70	KSU.Desa Naha Kramo Jaya Mandiri
71	KSU. Gerbang Dema Belalau Indah
72	KSU. Mudip Mading
73	KSU. Ledung Mading
74	KSU.Sumber Makmur
75	Koperasi Jasa Pemung Tawai Telu
76	KSU. Bangen Tawai
77	Kop. Distribusi Sahabat Setia
78	KSU Bangen Tawai
79	KSU. Bahau Hulu
80	KSU. Tunas Harapan
81	KSU. Data benuang
82	KSU. Gerbang Dema
83	KSU.Perintis
84	KUD. Long Nawang
85	Koperasi Jasa Angkasa Ampung Sejahtera
86	KSU. Sahabat Sejati



Persentase Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2023 sebanyak 86 Koperasi.

Untuk indikator Koperasi Aktif dapat terealisasi sebesar 72,26 % dengan hitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100 \%}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$$

$$86/119 \times 100 \% = 72,26$$

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja OPD
Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Peningkatan	
	Penurunan	Peningkatan
1		



Dari Tabel , dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

Persentase koperasi aktif di Tahun 2023 yaitu sebesar 72,26%, mengalami sedikit kenaikan dengan tahun sebelumnya yaitu 23,42%. Mengalami kenaikan, mencapai target yakni sebesar 72% Hal ini disebabkan oleh beberapa koperasi yang melaksanakan RAT. Selain itu juga karena telah dilaksanakannya program koperasi yang akan dibubarkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM

Untuk mencapai indikator kinerja utama OPD keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Adapun faktor Penghambat Koperasi Aktif adalah :

1. Sumber daya manusia Koperasi masih belum memadai.
2. Pengurus Koperasi yang kurang memiliki waktu luang atau masih dianggap bukan tugas pokok
3. Kurangnya pemahaman gerakan Koperasi dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dan partisipasi, pengawasan anggota dan pengelolaan koperasi untuk pengembangan koperasi.
4. belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan perangkat koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.
5. Belum optimal Koperasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa daerah.

Faktor Pendukung Persentase Koperasi Aktif adalah :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkan jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya acuan mekanisme pemeriksaan Koperasi oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2020, Tentang Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
5. Tersedianya tenaga Pendamping Koperasi yang siap membantu penyusunan laporan RAT.
6. Adanya himbauan pelaksanaan RAT setiap awal tahun. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.
7. Kerja sama Tim yang baik

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi.



3. Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan.
4. Meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.
5. Meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga.
6. Meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malinau dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sasaran Ketiga dengan indikator kinerja sasaran Koperasi Aktif di targetkan sebesar 72% dapat terealisasi 72,26% atau capaian kinerjanya mencapai 100,36% sangat berhasil dari target kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini Koperasi Aktif ada peningkatan, dari tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan adanya pendidikan dan latihan perkoperasian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan berbagai kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

b. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Efisiensi Biaya} \\ & = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif sebesar Rp. 388.969.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 271.628.267,- atau capaian realisasi sebesar 69,35% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 48,84% Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 117.340.733,-



Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia :

1. SDM OPD Disperindag dilaksanakan mengikuti : Bimbingan Teknis Pemantauan Teknologi Informasi dalam Pendataan KUKM (ODS-Koperasi

Dalam melaksanakan tugas bidang koperasi dan UMKM di dukung oleh 8 personil terdiri dari : 1 orang kabid, 3 orang jabatan fungsional, 3 orang staf ASN, 1 orang staf Non ASN

2. SDM Pengurus Koperasi :

- Laporan Keuangan Koperasi
- Pelatihan Koperasi Pengembangan Bisnis dan Usaha Model Kemitraan untuk Meningkatkan Bisnis Sektor Real

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Analisis Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang
Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja OPD tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	100,36
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,36

Penjelasan Keberhasilan/Kegagalan :Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

- Realisasi Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, realisasi indikator program (72%) dengan target (72%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100,36%). Indikator Kinerja **"Berhasil"**
- Realisasi Indikator Kegiatan (86koperasi/119koperasi = 72,26%) lebih tinggi dari target (72 persen),Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%),Indikator Kinerja **"Berhasil"**dikarenakan target yang terlalu tinggi pada RENSTRA.
- Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, (75orang) sama dengan target(75 orang), Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%), Indikator Kinerja **"Berhasil"**



DOKUMENTASI KEGIATAN KOPERASI TAHUN 2023



Gambar 10 : Laporan Keuangan Koperasi



Gambar 11 : Pelatihan Koperasi Pengembangan Bisnis dan Usaha Model Kemitraan untuk Meningkatkan Bisnis Koperasi Sektor Real



Sasaran Keempat : Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil

Dari Tabel 3.2 diatas dapat target vs realisasi Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil tahun 2023 target 73,30% sedangkan realisasi 17,27% dengan capaian 23,57%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Unit usaha	17,27	8,42	14,00	15,48	19,83

Sumber : Bidang Koperasi dan UMKM Disperindag

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Usaha Mikro dan Kecil tahun 2023 sebesar 17,27% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 14,00%, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 15,48% atau realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,36% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 19,83% realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 15,48%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target REN\$TRA

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Unit usaha	17,27	73,30	23,57

Sumber : Bidang Koperasi dan UMKM Disperindag 2023



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Usaha Mikro dan Kecil tahun 2022 sebesar 14,00% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 73,30% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian Usaha Mikro dan Kecil sebesar 23,57% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

REKAP DATA UMKM KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2023
1	MALINAU KOTA	1317
2	MALINAU UTARA	548
3	MALINAU BARAT	535
4	MENTARANG	140
5	MALINAU SELATAN	97
6	MALINAU SELATAN HILIR	98
7	SUNGAI TUBU	18
8	MALINAU SELATAN HULU	17
9	MENTARANG HULU	11
10	KAYAN SELATAN	27
11	KAYAN HULU	72
12	KAYAN HILIR	108
13	PUJUNGAN	29
14	BAHAU HULU	55
15	SUNGAI BOH	17
TOTAL		3089

Usaha Mikro dan Kecil dapat dilihat dari hasil capaian indikator kinerja pada Persentase Pencapaian Usaha Mikro dan Kecil secara keseluruhan dengan Realisasi 17,27% dan capaian kinerja 23,57%



Persentase Jumlah UMK wira usaha baru pada tahun 2023 sebanyak 522 UMKM.
Untuk indikator Persentase UMK dapat terealisasi sebesar 17,27 % dengan hitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil} \times 100 \%}{\text{Jumlah Seluruh UKM}} = \frac{522 \times 100\%}{3022} = 17,27\%$$

Tabel 3.11
Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja
Pemerintah Disperindag Serta Alternatif Solusi yang dilakukan
di Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan / Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil		1. Pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana atau terintegrasi melalui Online single submission (OSS). 2. Adanya program Pemerintah pusat BPUM untuk pengembangan Usaha Mikro	1. Terus memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi Perizinan yang diperlukan untuk berusaha. 2. Terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha. 3. Terus meningkatkan kerjasama pemasaran baik secara online dan offline

Dari Tabel , dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

I. **PERSENTASE PENINGKATAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

Untuk mencapai indikator kinerja utama OPD keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Adapun Faktor yang menghambat Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil :

- 1. Kurang dapat mengendalikan keuangan
- 2. Gagal dalam merencanakan
- 3. Tidak mampu dalam melakukan peralihan
- 4. Persaingan yang tidak sehat Kurangnya akses Pasar dalam memasarkan produk UMKM
- 5. Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan
- 6. UMKM belum menyadari HAKI (Hak Merk) jadi belum banyak UMKM yang memprioritaskan HAKI padahal Usaha UMKM sudah berjalan lama.



7. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang teknologi digitalisasi

Sedangkan Faktor Pendukung Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkan jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.
5. Kerjasama Tim yang baik
6. Kemauan
7. kemampuan
8. Tekad yang kuat dan kerja keras
9. Kesempatan dan peluang
10. Dukungan Pemerintah terhadap akses permodalan, regulasi dan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan dan kompetensi.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

1. Memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha.
2. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha.
3. Meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malinau dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan menumbuh kembangkan UMKM dalam meningkatkan kompetensi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Efisiensi Biaya} \\ & = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \end{aligned}$$



Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp. 4.034.330.300,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.370.012.090,- atau capaian realisasi sebesar 83,53% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 17,27% Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 664.318.210,-

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia :

1. SDM OPD Disperindag dilaksanakan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan UMKM

Dalam melaksanakan tugas bidang koperasi dan UMKM di dukung oleh 8 personil terdiri dari : 1 orang kabid, 3 orang jabatan fungsional, 3 orang staf ASN, 1 orang staf Non ASN

2. SDM Pelaku UMKM

- Peningkatan SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
- Pelatihan kewirausahaan di desa pelita Kanaan, pulau sapi dan loreh.

Dengan rincian :

- Pelatihan bussines plan di desa pelita Kanaan (35 org)
- Pelatihan bussines plan di desa Pulau sapi (35 org)
- Pelatihan bussines plan di loreh (35 org)
- Pelatihan digital marketing di Malinau (95 org)

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Analisis Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja OPD tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (MK)	23,57
Rata-Rata Capaian Kinerja			23,57

Penjelasan Keberhasilan/Kegagalan :Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

- Realisasi Indikator ProgramPemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), realisasi indikator program (17,27%) dengan target (73,30). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (23,57%). Indikator Kinerja **“Cukup Berhasil”**
- Realisasi Indikator Kegiatan (522umkm/3022umkm = 17,27%) lebih rendah dari target (73,30 persen), Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (23,57%), Indikator Kinerja **“Cukup Berhasil”** dikarenakan target yang terlalu tinggi pada RENSTRA.
- Realisasi Indikator Sub Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, (522umkm) melebihi target (200umkm), Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (17,27%), Indikator Kinerja **“Sangat Berhasil”**



DOKUMENTASI KEGIATAN UMKM TAHUN 2023



Gambar 12 : Pelatihan Strategi Digital Marketing untuk peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



Gambar 13 : Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM Desa Pelita



Gambar 14 : Pelatihan Strategi Digital Marketing untuk peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

C. Realisasi Anggaran

Adapun anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 388.969.000,00	Rp. 271.628.267,00	70
2.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.259.180.300,00	Rp. 1.031.740.148,00	81
3.	Pengembangan UMKM	Rp. 2.775.150.000,00	Rp. 2.356.271.942,00	85
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.547.103.426,00	Rp. 2.187.084.917,00	85
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 899.919.750,00	Rp. 827.378.534,00	91,93
6.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 199.777.000,00	Rp. 65.574.224,00	33
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 79.301.500,00	Rp. 71.630.078,00	90
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 3.130.085.427,00	Rp. 2.647.357.902,00	85
9.	Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp. 5.546.054.379,00	Rp. 5.550.964.478,00	94,95
Jumlah		Rp. 17.125.541.379,00	Rp. 14.991.630.490,00	87,54



Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau selama tahun 2023 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau periode tahun 2023. Pada awal tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	199
2.	Meningkatnya Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Revitalisasi Pasar	177,78
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	100,36
4.	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	23,57

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Melengkapi sarana prasarana, kebijakan, pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.
2. Pengembangan sistem pelaporan secara online /aplikasi bagi pelaku usaha
3. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.



4. Mengoptimalkan peran dinas dalam pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok melalui aplikasi terintegrasi
5. Pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk memenuhi standar Pasar

Pelaporan Kinerja ini akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis berdasarkan data-data yang tersedia. Semua lini sebagai implementasi pertanggungjawaban yang telah dipercayakan kepada masyarakat Kab. Malinau khususnya dan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya.

HASIL EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2023

Rekomendasi dari hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut :
 - a. Komponen Perencanaan Kinerja :
 - Menyusun crosscutting perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
 - b. Komponen Pengukuran Kinerja :
 - Laporan pengukuran kinerja agar disusun sampai level staf
 - Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
 - c. Komponen Pelaporan Kinerja :
 - Dokumen laporan kinerja agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
 - Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
 - d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal :
 - Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar
 - Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti;



3. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)

Progres Perbaikan Penerapan SAKIP Tahun 2023

- Memperbaiki Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai arahan Kemenpan RB.
- Menyampaikan informasi kepada atasan langsung secara berjenjang untuk Menyusun Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja
- Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal per semester.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini merupakan wujud kesungguhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Untuk itu perlu kebersamaan peran dari segenap unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Dinas,



YULI RIANA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I / IV b

Nip. 19750721 200112 2 001



**DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KABUPATEN**

MALINAU

**Jl. Pusat Pemerintahan Gedung
Gadis Lt.II**